BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian yang mengenai efektivitas bantuan tunai program keluarga harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul, Tujuan, Manfaat, Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian, Perbedaan Dan Persamaan
1.	(Deri, 2024)	Judul: Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung Kacamatan Panjang Kelurahan Ketapang Manfaat: Hasil Penelitian Ini Memberikan Kontribusi Penting Dalam Mengevaluasi Sejauh Mana Program Keluarga Harapan (PKH) Mampu	Hasil: Dari Penelitian Ini Adalah Sebesar 54.60% Yang Termasuk Dalam Kategori Efektif. Perbedaan: Beda Nya Lokasi Penelitian, Bedanya Indikator Peneliti Ini Berfokus Pada Ketepatan Dana Ketepatan Sasaran, Dan Sosialisasi. Persamaan: Peneliti Sama-Sama Membahas Tentang Efektivitas Program Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

		Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Rtm) Tujuan: Untuk Menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung. Metode: Deskriptif Kualitatif	
2.	(Janah, 2023)	Judul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan: Mengetahui Pelaksanaan Dan Efektivitas PKH Di Kecamatan Purwojati, Banyumas Manfaat: Memberikan Gambaran Efektivitas Program Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesabaran Masyarakat Akan Pendidikan Serta Kesehatan	Hasil: Secara Keseluruhan Tingkat Efektivitas PKH Di Kecamatan Purwojati Sudah Baik Dan Efektif Berdasarkan Lima Indikator: Pemahaman Program, Tepat Sasaran Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Dan Perubahan Nyata. Perbedaan: Perbedaan Lokasi Penelitian Dan Penambahan Sudut Pandang Teori Ekonomi Islam Persamaan: Sama-Sama Meneliti Tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

		Metode: Deskriptif Kualitatif	
3.	**(**Herjayanti**,** 2025**)**	Judul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang Tujuan: Mengetahui Efektivitas PKH Dalam Meningktkan Kesejahteraan Masyarakat Serta Mengevaluasi Dampak Positif Bagi Penerima Bantuan Metode: Kualitatif Degan Teknik Pengumpulan Data, Wawancara, Observasi, Studi Pustaka, Dan Dokumentasi.	Hasil: Program PKH Sudah Efektif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Membantu Meringankan Beban Kemiskinan. Namun, Indikator Ketepatan Sasaran Masih Belum Efektif. Persamaan: Sama-Sama Meneliti Tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Perbedaan: Terletak Pda Lokasi, Waktu Penelitian, Serta Fokus Evaluasi Pada Ketepatan Sasaran Data
4.	(Umaroh & Sujiatmi, 2019)	Judul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Hasil: Pelaksanaan Sudah Sesuai Dengan Alur PKH Yang Meliputi Penetapan Sasaran, Sosialisasi, Validasi, Pemutakhiran

		Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Tujuan: Untuk Melihat Sejauh Mana Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Metode: Analisis Deskriptif Kualitatif Dengan Teknik Uraian Data Secara Sistemik Dan Sistematik.	Data, Hingga Verifikasi, Komitmen Fasdik, Faskes, Dan Kesos. Persamaan: Meneliti Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan: Beda Ya Lokasi, Waktu, Beda Nya Fokus Pada Kesesuaian Alur Prosedur Pelaksanan Program.
5.	**(**Yuliani, 2020)	Judul: Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponrogo. Tujuan: Untuk Mengetahui Efektivitas	Hasil: Menunjukan Bagaimana Efetivitas Pencapaian Tujuan, Integrasi, Dan Adaptasi Program PKH Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Persamaan: Sama-Sama Meneliti Tentang Efektivitas Program

		Pencapaian Tujuan, Efektivitas Integrasi, Dan Efektivitas Adaptasi Dalam Pengelolaaan PKH Di Kabupaten Pnorogo. Manfaat: Memberikan Gambaran Mengenai Keberhasilan Program PKH Dalam Meningkatan Taraf Hidup KPM. Metode: Penelitian Lapangan Dengan Pendekatan Kualitatif.	Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat Miskin. Perbedaan: Perbedaan Lokasi, Tahun Penelitian, Serta Fokus Spesifik Pada Indikator Efektivitas (Tujuan, Integrasi, Dan Adaptasi).

Sumber: Peneliti 2026

B. Landasan Teori

1. Pengertian Administrasi Publik

Adminstrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut tata usaha. Sementara itu, administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi,

pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber (Haryadi, 2009**).**

Administrasi publik adalah bidang ilmu dan praktik yang mengelola sumber daya serta proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik dan melayani kepentingan masyarakat. Secara umum ia mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program serta layanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun lembaga publik lainnya. Administrasi publik sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana organisasi publik bekerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, serta cara meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitasnya. Jadi administrasi publik berperan sebagian jembatan antara kebijakan antara kebijakan dengan implemantasinya di lapangan, dengan fokus pada perberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umum.

2. Paradigma Administrasi

Paradigma administrasi adalah suatu cara pandang atau kerangka berpikir mendasar yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mempraktikkan ilmu administrasi. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh (Kuhn, 1962) untuk menggambarkan "pola" atau "contoh" yang disepakati oleh suatu komunitas ilmuwan tentang bagaimana suatu persoalan harus diselesaikan. Dalam ilmu administrasi, khususnya

administrasi publik, paradigma membantu menentukan apa yang harus dipelajari (*fokus*) dan di mana hal itu dipraktikkan (*lokus*).

Menurut (Henry, 2013) merumuskan lima paradigma berdasarkan pada *fokus* kepentingannya dan *locus* dimana secara institusional administrasi dipraktekkan, yaitu: (1) Dikotomi Politik-Administrasi, (2) Prinsip-Prinsip Administrasi, (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, (4) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan (5) Administrasi Publik 5 Sebagai Administrasi Publik. Fokus paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926) adalah pemisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintah, dimana substansi ilmu politik hanya meliputi masalah-masalah politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan, dan substansi administrasi pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam sistem birokrasi pemerintah.

3. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil (KBBI, 2005). Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasiatau program yang akan dijalankan. Berarti juga dapat dikatakan bahwa efektivitas

merupakaan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana apabila semakin besar persentase target yang dapat dicapai, maka akan semakin tinggi pulala keefektivitasanya, Dikatakan efektif apabila tercapai nya tujuan ataupun sasaran–sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rahmadi, 2022).

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan Masyarakat kurang mampu. Efektivitas berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan yangsudah ditetapkan di dalam suatu instansi, aktivitas ataupun program. (Zakiyah, 2020)

Efektifitas menurut (Abdurahmat, 2003) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas (Siagian, 2001) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalan kannya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan Gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. (Luthfi, 2019)

Kemudian Efektivitas menurut (Siswanto, 1990) berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut (Sutarto, 1978)Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan (Schermerhorn, 1998). Menurut (Handoko, 1997), Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut (Siagian, Administrasi pembangunan, 1986) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kemuja, 2022)

Lebih lanjut Pengertian lain menurut (Susanto A. B., 2005) “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 2005) Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya secara matang. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat dicapai. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengasn berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. (Mayssara, 2014)(Abo Hassanin, 2014)

Di samping itu Menurut Richard M Steers dalam (Saputro, 2020) efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:

1) Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinyabahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasilhasil dengan tujuan organisasi.
2) Prespektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersamasama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.

3) Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya *relatif homogen*, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.

Efektivitas dari pelaksanaa program bantuan sosial dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut (Sutrisno, 2007) yakni sebagai berikut:

1) Pemahaman program

Pemahaman program adalah indikator yang digunakan untuk menganalisis seberapa baik pengetahuan dari pihak yang terlibat mengenai program yang dilaksanakan, selain ituindikator ini juga bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasiyang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan mengenai program bantuan sosial tunai (BST) dengan pemahaman program yang baik maka segala bentuk rencana akan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Selain itu juga dapat kita pahami bahwa Pemahaman program merujuk pada pengetahuan dan kesadaran tentang tujuan, mekanisme, dan manfaat suatu program. Dalam konteksprogram bantuan sosial, ini berarti memahami apa yang ingin dicapai, bagaimana program dilaksanakan, dan

manfaat yang diharapkan, serta peran dan tanggung jawab semua pihak terkait. Pemahaman yang baik tentang program penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, tepat sasaran, dan pencapaian tujuan program yang optimal. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaksanaan program dapat terganggu dan dampak positifnya mungkin tidak maksimal.

2) Tepat sasaran

Tepat sasaran atau ketepatan sasaran adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai sasaran atau target yang ingin dicapai, ketepatan sasaran sangat mendukung efektivitas dari pelaksanaan sebuah program. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis indikator ini digunakan untuk melihat target atau sasaran yang dicapai dari pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tunai bagi Masyarakat.

Tepat sasaran merujuk pada sejauh mana suatu program, kebijakan, atau intervensi mencapai kelompok atau individu yang memang menjadi target utama atau penerimamanfaat yang dimaksud. Dalam konteks program bantuan sosial, "tepat sasaran" berarti bahwa bantuan atau dukungan yang diberikan ditujukan kepada masyarakat atau kelompok yang benar-benar membutuhkan dan sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, program tersebut efektif dalam menyalurkan manfaat kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari bantuan tersebut, sehingga mencegah adanya penyaluran yang tidak relevan atau penyalahgunaan.

3) Tepat waktu

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan atau dukungan disalurkan kepada penerima manfaat pada waktu yang diperlukan. Dalam konteks program bantuan sosial, ini berarti bantuan diberikan tanpa penundaan yang signifikan, memastikan bahwa penerima dapat memanfaatkan dukungan tersebut secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Hal ini berkaitan dengan penggunaa waktu dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Penggunaan waktu tersbeut haruslah sesuai dengan jadwal yang usdah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Penggunaan waktu yang tepat akan sangat mendukung terciptanya efektivtas dari pelaksanaan suatu program.

4) Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan berarti berhasilnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui upaya yang terencana dan terukur. Ini menunjukkan bahwa semua langkah, strategi, dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut telah dikelola dengan baik, dan hasil yang diinginkan telahterwujud. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam implementasi, tetapi juga efektivitas perencanaan dan adaptasi terhadap tantangan yang muncul. Dalam konteks individu, organisasi, atau kebijakan publik, tercapainya tujuan menunjukkan bahwa proses yang dilakukan telah efektif dalam mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

5) Perubahan nyata

Perubahan nyata merujuk pada perubahan yang memberikan dampak signifikan dan terlihat jelas pada kondisi atau situasi yang ada, bukan hanya bersifat sementara atau simbolis. Ini mencakup perubahan yang dapat diukur dengan indikator konkret, mempengaruhi langsung kehidupan atau sistem yang relevan, dan diakui oleh pihak-pihak yang terlibat. Perubahan nyata mencerminkan hasil

yang substansial dari usaha yang dilakukan, menghasilkan efek yang signifikan dan berdampak pada kondisi yang ada.

Perubahan nyata adalah transformasi yang menciptakan dampak substansial dan jelas pada suatu situasi atau kondisi, yang dapat dilihat, diukur, dan dirasakan secara langsung. Perubahan ini melibatkan perubahan mendasar yang mengubah cara kerja, perilaku, atau hasil, dan biasanya disertai dengan hasil yang signifikan yang menggantikan keadaan sebelumnya. Berbeda dengan perubahan kosmetik atau superfisial, perubahan nyata mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi individu atau kelompok yang terkena dampak.

Dengan demikian adapuan efektifitas dalam konteks bantuan sosial, Dalam hal program bantuan sosial, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran. Peningkatan pendapatan, peningkatan akses ke layanan dasar, atau penurunan tingkat kemiskinan adalah indikatornya. Efektivitas program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti distribusi yang tepat sasaran, pengelolaan anggaran yang efektif, dan kepuasan penerima manfaat.

4. Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas program diukur bukan hanya oleh pencapaian tujuan akhir, tetapi juga oleh cara program dijalankan, penggunaan sumber daya, dan dampak pada penerima manfaat.

Efektivitas program adalah ukuran Keberhasilan suatu programdalam mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut efektifitas program. Program efektif jika mampu memberikan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektivitas juga mencakup kemampuan program untukmenyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan penerima manfaat.

Efektivitas program mengacu pada sejauh mana suatu program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang optimal. Ini menunjukkan seberapa baik program tersebut mampu memberikan hasil yang diharapkan atau mengatasi masalah yang menjadi alasan program tersebut dibentuk. Efektivitas program diukur dari kemampuan program untuk menghasilkan dampak positif sesuai dengan indikator yang telah dirancang sebelumnya (Sary, 2024)

Menurut Richard M. Steers dalam (Saputro, 2020), efektivitas program adalah "kemampuan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta memenuhi kebutuhan stakeholder

secara efisien." Steers menekankan bahwa efektivitas program bukan hanya tentang pencapaian hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil tersebut dicapai dan dampaknya terhadsuap penerima manfaat .

Teori efektivitas program mengacu pada berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah program dapat dinilai efektif atau tidak. Teori ini menggabungkan konsep-konsep dari manajemen, kebijakan publik, serta evaluasi program. Beberapa teori dan model yang sering digunakan dalam mengevaluasi efektivitas program meliputi (Advebty, 2023):

1) Teori Logika Program (*Program Logic Model*)

   Teori logika program menyatakan bahwa efektivitas program bergantung pada hubungan yang jelas antara sumber daya yang digunakan (*input*), kegiatan yang dilakukan (*proses*), hasil yang diharapkan (*output*), dan dampak yang dihasilkan (*outcome*). Dalam teori ini, efektivitas diukur berdasarkan apakah *input* dan *proses* program menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan.

   a) *Input*: Sumber daya yang digunakan dalam program (misalnya dana, tenaga kerja).
   b) *Proses*: Aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program.
   c) *Output*: Hasil langsung dari aktivitas tersebut (misalnya jumlah orang yang terlibat, produk yang dihasilkan).

d) *Outcome*: Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari *output* Program

2) Teori Sistem (*Systems Theory*)

Teori sistem memandang efektivitas program sebagai hasil interaksi yang harmonis antara berbagai elemen program. Program dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait (*input, proses, output*, dan lingkungan eksternal). Efektivitas program dipengaruhi oleh sejauh mana semua komponenini berfungsi secara sinergis. Teori ini juga menekankan pentingnya umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan efektivitas. Melalui evaluasi dan umpan balik, program dapat terus diperbaiki agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

3) Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan atau metode yang dapat diterapkan secara universal untuk mencapai efektivitas program. Sebaliknya, efektivitas program bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti lingkungan, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik organisasi atau kelompok sasaran. Menurut teori ini, program harus disesuaikan dengan kondisi spesifik agar bisa efektif.

4) Teori Implementasi Kebijakan

Teori ini mengkaji efektivitas program dari sudut pandang implementasi kebijakan. Efektivitas tergantung pada sejauh mana

kebijakan yang dirumuskan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan rancangan awal. Hal ini meliputi komitmen dan kapasitas organisasi yang melaksanakan program, serta penerimaan dari kelompok sasaran. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, kesesuaian regulasi, serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi efektivitas implementasi program.

5) Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model CIPP digunakan dalam evaluasi program untuk menilai efektivitasnya melalui empat komponen utama:

a) *Context*: Menilai relevansi program berdasarkan analisis situasidan masalah yang ingin diselesaikan.
b) *Input*: Mengevaluasi sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk mendukung program.
c) *Process*: Menganalisis pelaksanaan program, termasuk hambatan dan kesesuaian dengan rencana.
d) *Product*: Menilai hasil akhir program, baik dalam hal *output* maupun *outcome*. Model CIPP menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada setiap tahap program untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuain program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program.

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh *Kerkpatrick* bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti.

Bermanfaatkah dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program. Maka dari itu, Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi target yang telah di tetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang di hasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. (Anis, 2021).

5. Pengertian Bantuan Sosial PKH

Bantuan sosial PKH merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep bantuan sosial PKH mencakup berbagai bentuk intervensiyang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Program bantuan sosial PKH sering kali melibatkan penyediaan sumber daya, baik finansial maupun non- finansial, kepada mereka yang membutuhkan, dengan harapan dapat meringankan beban hidup dan menciptakan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Menurut (Retnaningsih, 2020) Bantuan sosial PKH merupakan bentuk bantuan yang merupakan sebuah usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial. “Secara konseptual bantuan sosial tunai dimaksudkan untuk meringan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. (Rahman & Malawat, 2021).

Bantuan sosial PKH merupakan program pemerintah yang ditujukan Memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita risiko sosial. Bantuan dengan itu Pemerintah memberikan berbagai

jenis, seperti barang dan moneter. Program bantuan sosial PKH ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Pengertian permensos berdasarkan UU No 1 Tahun 2018, Merupakan bantuan berupa barang, uang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, Kelompok dan masyarakat dalam kelompok kurang mampu secara finansial. Program ini Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang dirasakan Masyarakat Indonesia. (Fuaddah & Fridayne, 2023)

Bantuan sosial PKH biasanya diberikan melalui program-pemerintah atau organisasi non pemerintah (NGO) dan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan tunai langsung, penyediaan kebutuhan sehari- hari, atau akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Program ini dirancang untuk membantu kelompok rentan di masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan sosial adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui distribusi sumber daya. Bantuan sosial ini sering kali berupa bantuan uang tunai, paket sembako, atau program-program khusus lainnya yang dirancang untukmengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam konteks akademis dan praktis, bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang digunakan untuk memperkuat

jaringan pengaman sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. (Khoerunisa, 2023).

6. Tujuan Pemberian Bantuan PKH

Ada beberapa tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, menggarap sifat SDM, dan mengubah bantuan pemerintah dan pelaksanaan RTM yang agak kurang baik perkembangannya, khususnya kelompok RTM. Selain itu ada juga tujuan eksplisit PKH yang mencakup empat hal, yaitu:

1) Dapat mengerjakan status keuangan RTM.
2) Mengupayakan kesejahteraan dan status kesehatan ibu hamil, ibu pasca hamil, dan balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
3) Mengembangkan lebih lanjut akses dan sifat administrasi pelatihan dan kesejahteraan, terutama untuk anak-anak RTM.
4) Memperluas derajat pelatihan dan kesehatan keturunan RTM.

7. Syarat Penerima Bantuan PKH

Menurut Pedoman Umum PKH (2019:19) untuk mendapatkan bantuan tunai, peserta PKH harus memenuhi persyaratan dan berkomitemen untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) adalah sebagai berikut Kriteria Penerima PKH:

1. Harus tercatat dalam data terpadu kesejahteraan soasial (DTKS) dengan NIK dan KK yang valid di Dukcapil
2. Tergolong keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan penilaian sosial ekonomi setempat
3. Memiliki setidaknya satu komponen (kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.)

1) Kesehatan

Kesehatan adalah modal yang tidak ternilai bagi individu dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Kurang perhatian terhadapmasalah kesehatan memiliki dampa negative pada kehidupan masyarakat dan individu. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan adalah penting bagi penerima PKH sebagai berikut: Memberikan vitamin A kepada anak-anak usia 0-6 tahun.

a. Menerima vaksinasi lengkap dan melakukan timbangan berat badan secara teratur setiap bulan.
b. Melakukan pemeriksaan berat badan secara teratur dan terima vitamin A dua kali setahun, pada bulan februari dan agustus.
c. Jika ada fasilitas pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diposyandu terdekat, ikuti program PAUD.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai lingkungan belajar untuk mempersiapkan manusia untuk memainkan peran yang sesuai.

Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karena pendidikan memberikan pengalaman perspektif hidup kepada generasi berikutnya. Pendidikan juga merupakan proses timbal balik antara manusia dengan satu sama lain dan lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan pertumbuhan potensi setiap orang untuk tujuan hidupnya dalam masyarakat.

Pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diriya untuk memiliki kekatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan bermasyarakat, dan akhlak mulia. Pelayanan harus didukung untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

Anak-anak yang menrima bantuan PKH harus pergi ke sekolah baik formal maupun non formal, karena mereka dibantu oleh pemerintah dengan bantuan PKH. Sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan. Untuk mempersiapkan individu berkembang menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan dunia di masa yang akan datang. Sekolah diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan potensi anak-anak, meningkatkan kualitas hidup, serta menghargai mertabat manusia untuk mencapai tujuan nasional. Sekolah memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai lembaga mempersiapkan anak untuk hidup, mencerminkan keadaan dimasyarakat, memberikan pembinaan, dan menyediakan lingkungan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pendidik sebagai orang tua.

Menurut Pedoman Umum PKH anak-anak yang menerima PKH harus memenuhi persyaratana akademik dan hadir di sekolah atau satuan pendidikan selama minimal 85% dari hasil sekolah sebulan selama tahunakademik sebagai berikut:

a. Peserta PKH berusia 7-15 tahun harus terdaftar di lembaga Pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MT/SMLB/Paket B termasuk SMP/MT terbuka) mereka juga harus hadir dikelas setidaknya 85% dari hari

belajar efektif setiap bulan selama tahun akademik. Anak-anak yang berusia 5 dan 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar harus memenuhi persyaratan pendidikan.

b. Anak-anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau MT, anak- anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti SDLB atau SMPLB.

c. Peserta PKH yang berusia antara 15 hingga 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar harus didaftarkan ke satuan pendidikan reguler atau non reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).

d. Anak-anak peserta PKH yang bekerja, menjadi pekerja anak atau meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama harus mengikuti program pemulihan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke sekolah. Layanan rumah singgah atau shalter yang diberikan kepada anak jalanan oleh Kementrian Sosial dan Kemenakertrans untuk pekerja anak merupakan Program Remedial.

3) Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bukan sekadar kondisi di mana seseorang memiliki uang yang cukup, melainkan sebuah

tatanan kehidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin. Secara luas, konsep ini mencakup segala bentuk upaya kolektif yang dirancang oleh masyarakat atau pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari pangan, sandang, perumahan, kesehatan, hingga akses pendidikan dan perlindungan hukum.

Dalam perspektif yang lebih dalam, kesejahteraan sosial berfungsi sebagai sistem pertahanan bagi individu agar mereka tetap memiliki martabat kemanusiaan meskipun berada dalam kondisi sulit. Hal ini melibatkan penyelenggaraan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan (seperti penyandang disabilitas atau lansia), serta rehabilitasi bagi mereka yang mengalami hambatan sosial. Intinya, kesejahteraan sosial tercipta ketika hambatan-hambatan hidup dapat diminimalisir melalui kebijakan publik yang adil, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi lingkungannya tanpa rasa takut akan kemiskinan ekstrem atau pengucilan sosial.

Keberhasilan kesejahteraan sosial dalam suatu negara biasanya diukur dari sejauh mana pemerintah mampu

menciptakan jaring pengaman sosial yang inklusif. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan tunai, tetapi tentang membangun ekosistem di mana infrastruktur sosial berfungsi dengan baik seperti rumah sakit yang terjangkau, sekolah yang berkualitas, dan lapangan kerja yang manusiawi. Ketika elemen-elemen ini terpenuhi secara berkelanjutan, masyarakat akan mencapai kemandirian, yang merupakan tujuan akhir dari kesejahteraan sosial: yaitu mengubah kondisi ketergantungan menjadi keberdayaan yang kokoh.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

